

DAFTAR PUSTAKA

- Aderiswanto, R. (2024) “Tindakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Hutan Riau,” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(2), pp. 26–34.
- Adrianti, N. and Meganata, R. (2024) “Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan,” 2(1), pp. 740–748.
- Ageng, P. (2021) “Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Kawasan Hutan Lindung,” 10(1), pp. 1–6.
- Akbar, I. and Najah, S. (2022) “Literature Review: Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kalimantan,” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2).
- Ambarwati, M.E. (2019) “Peran Perhutani Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang,” XXVIII(2), pp. 88–113.
- Aprilian, D. *et al.* (2021) “Partisipasi Masyarakat dan Analisis Kelembagaan LMDH dalam Program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di RPH Wanaraja BKPH Cibatuh KPH Garut,” pp. 225–236.
- Arham, A.N. (2023) “Supremasi Hukum Terhadap Pengrusakan Hutan Perspektif Hukum Pidana Islam.” IAIN Parepare.
- Arianto, L. (2018) “The Concepts of Forest Governance Practices at Site Level in Indonesia,” *Journal of Public Administration Studies*, 3(1), pp. 1–9.
- Arso (2024) *Lagi, Hutan-Hutan Di Ponorogo Alami Kebakaran, Kanal Ponorogo*. Available at: <https://kanalindonesia.com/2024/08/10/bpbd-ponorogo-catat-puluhan-hektare-lahan-dan-hutan-terbakar/> (Accessed: March 10, 2025).

- Asnur, D. (2024) "Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung Yang Tersebar Di Kabupaten Asahan," 4307(1), pp. 124–129.
- Basuki (2025) "Letak Geografis Perum Perhutani di kawasan RPH Badegan, BKPH Sumoroto, KPH Madiun."
- C. Lestari (2025) *Rumah Dinas Mantri Kehutanan RPH Resor Pengelolaan Hutan Karangduwet, jogjacagar.*
- Chandra (2022) "Pengelolaan Aset Daerah Taman Hutan Kota dan Taman Satwa Oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), pp. 48–54.
- Farid, A.M. (2022) "Perhutanan Sosial sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta."
- Firmansyah (2026) "Peran Perhutani BKPH Bandar Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Hutan RPH Sodong," 6(2).
- Ghivary, R. Al and Mawar (2023) "Collaborative Governance in Management of Forest Land Owned To Perhutani Sukabumi Forest Stakeholder Unit," *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(2), pp. 196–211. Available at: <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i2.798>.
- Hanani, R. *et al.* (2024) "Proses Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten."
- Hartono (2024) "Aset Hutan di Kawasan RPH Badegan BKPH Sumoroto," p. 3.
- Hartono (2025) "Gambaran Umum BKPH Sumoroto."
- Iqsandri, R. (2025) "Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Cipta Kerja," 4(2), pp. 46–51.
- Jamika, F.I. *et al.* (2023) "Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya

- Hutan Di Indonesia,” *Pro-Life*, 10(2), pp. 853–863.
- Junaidi, Y.S. (2023) “Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia,” 8(September), pp. 427–435.
- Khalid, R.M. and Maidin, A.J. (2022) “Good Governance in Advancing SDGs: Way Forward for the ASEAN Countries,” in *Good governance and the sustainable development goals in Southeast Asia*. Routledge, pp. 232–238.
- Kisnanda, L.F. *et al.* (2023) “Penerapan Prinsip Visi Strategik Good Governance Dalam Pelayanan Disdukcapil Kota Padang Panjang Melalui Web Paduko,” 6, pp. 67–78.
- KRPH V, K. (2021) *Job Description Perum Perhutani Devisi Regional V*.
- Lalmuansanga, J. and Lalremruata, T. (2024) “Democracy And Good Governance: A Study Of Its Significance,” 9(2), pp. 1–15.
- Lestariningsih, P. (2023) “Perubahan Tutupan Lahan Kawasan Hutan Di Wilayah UPT KPH Bengkayang-Wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) I Dan Ii Tahun 2013, 2017 Dan 2021,” *Jurnal Hutan Lestari*, 11(4), pp. 898–909.
- Lira (2024) *Perhutani Madiun bersama Polres Ponorogo Pasang Spanduk Rawan Kebakaran Hutan di Sejumlah Titik, Perhutani Madiun*. Available at: <https://www.perhutani.co.id/perhutani-madiun-bersama-polres-ponorogo-pasang-spanduk-rawan-kebakaran-hutan-di-sejumlah-titik/> (Accessed: April 15, 2025).
- Lukum, W. (2022) “Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Lindung,” 7.
- McDonald, S. (2022) *9 Principles of Good Governance*, boardpro.com.
- Muhajir, I. (2019) “Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” 4, pp. 1–9.
- Nasrullah, N. (2024) “The Role, Obstacles, and Challenges of the Forestry Police

- in the Pesapa FMR's Work Area (Peran, Hambatan, dan Tantangan Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa)," 5(2), pp. 340–355.
- Natalia, A. (2022) "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), pp. 15–26.
- Nufus, M.R. *et al.* (2025) "Strategi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di NTT: Pendekatan K-Means Clustering Terhadap Data," 30, pp. 156–167.
- Ode, L. *et al.* (2025) "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur)," 3(4), pp. 28–35.
- Ponorogo, M. (2021) *Polisi Ringkus 2 Pencuri Kayu Milik Perhutani, Sampung, Redaksi Media Ponorogo.*
- Prasetia, H.W. (2023) "Dinamika Kelompok dan Kemitraan Konservasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri," 19(02), pp. 1–16.
- Purnama, D.H. *et al.* (2024) "Pengembangan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kibuk Dalam Tata Kelola Perhutanan Sosial Yang Baik (Good Forest Governance) Di Kota Pagaralam," 21(1), pp. 1–11.
- Purwandari, A.R. (2024) "Potret Multifungsi Hutan Di Kabupaten Jember : Dinamika, Tantangan, Dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Tahun 2024," 6(2).
- Rahman, A. (2023) "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Hutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan Untuk Lahan Pertanian (Studi Desa Selante Kec. Plampang Kab. Sumbawa) Government Supervision Of Forest Supervision As An Effort To Prevent Forest Damage To Agricultur," 3(1).

- Rismawan, A. (2023) “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara (Studi Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Dan Nusa Tenggara).”
- Riyanto, E. (2019) “Penentuan Tingkat Diskonto Dalam Penilaian Hutan,” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2 SE-), pp. 39–48. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.604>.
- Rizkiana, R. (2022) *Hutan Konservasi: Pengertian, Jenis, dan Fungsinya, Lindungi hutan*. Available at: <https://lindungihutan.com/blog/hutan-konservasi-pengertian-jenis-fungsi/> (Accessed: May 10, 2026).
- Romadloni, M.Y. et al. (2024) “Isolasi Bakteri Perlarut Fosfat (BPF) Pada Hutan Produksi Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pujon Hill UMM , Kabupaten Malang,” 23(1), pp. 91–102. Available at: <https://doi.org/10.55981/beritabiologi.2024.4148>.
- Rusydi (2023) *Struktur Organisasi Divisi Regional Jawa Timur, KPH Madiun*, perhutani.co.id.
- Samad, Z., Mustanir, A. and Pratama, M.Y.P. (2019) “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), pp. 379–395.
- Santana, T.H. (2025) “Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, Gaya Kepemimpinan, dan Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Perum Perhutani KPH Jember 1,” 7(2), pp. 535–547.
- Setiawan, F.A., Rembrandt, R. and Syofiarti, S. (2025) “Penertiban Pertanian pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (Desa Giri Mulyo Provinsi Jambi),” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), pp. 2496–2503. Available at: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1504>.

- Setiawan, M.F. and Nur, M.A. (2022) “Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi Muhamad,” 5(1), pp. 310–322.
- Setyaningrum, A. and Dewi (2024) “Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance,” 3(3), pp. 581–589.
- Sri, A. *et al.* (2024) “Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance,” 17(2), pp. 410–418. Available at: <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>.
- Tono, H. (2023) “Data Potensi Sumber Daya Hutan di Kawasan RPH Badegan, BKPH Sumoroto.”
- Ulifa, A. (2023) “Strategi Pesanggem dalam Penguasaan Lahan Perhutani: Studi di Resor Polisi Hutan (RPH) Majenon Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.”
- Widiatmika, K.P. (2019) “Tata Kelola Hutan Rakyat Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus : Rehabilitasi Hutan dan Lahan),” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), pp. 39–55.
- Widyaiswara (2021) “Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa (Studi di KPH Yogyakarta , Taman Nasional Gunung Halimun Salak , dan TN Gunung Ciremai).”
- Widyawati, L.F. and Istiqomah, A. (2023) “Implementation Of Good Forest Governance In Forest Management In Indonesia,” 2(02), pp. 77–88.
- Wulan, E. (2025) *Pemkab Ponorogo Catat Ada Belasan Ribu Hektar Lahan Kritis, RRI Madiun.* Available at: <https://rri.co.id/madiun/regional/1394252/pemkab-ponorogo-catat-ada-belasan-ribu-hektar-lahan-kritis> (Accessed: April 13, 2025).
- Yuwan (2020) *Perhutani Bersama Stakeholder Kembangkan Wisata Rintisan Bukit*

Suharto di Ponorogo. Available at:
<https://www.perhutani.co.id/perhutani-bersama-stakeholder-kembangkan-wisata-rintisan-bukit-suharto-di-ponorogo/>
(Accessed: April 4, 2026).

Zein, W.C. (2023) “Upaya Pencegahan Penebangan Liar di RPH Sumberkembang KPH Malang,” *Dinamika*, 342(193), pp. 850–853.

